

PERAN DEKRANASDA MELALUI PELATIHAN TENUN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN MASYARAKAT KOTA PONTIANAK

Ikhsan Restu Prasetyo¹, Imelda Yulianti², Rika Rahmatin Novianti³, Risky Putri Chelsia Rahmadani⁴

Abstrak: Indonesia terkenal akan seni dan kebudayaannya yang beragam. Salah satunya adalah kebudayaan tenun. Tenun merupakan salah satu bagian dari Warisan Budaya Tak Benda yang dimiliki bangsa Indonesia. Oleh karena itulah masyarakat harus melestarikan tenun agar tidak hilang seiring perkembangan zaman. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana peran dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Pontianak dalam menyelenggarakan program pelatihan tenun bagi masyarakat khususnya bagi mereka yang memang sudah menjadi pengrajin serta pelaku usaha mikro dengan produk tenun atau yang belum sama sekali belajar menenun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk mengetahui peran Dekranasda dalam pelatihan tenun ini digunakan teori implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III melalui empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa implemementasi program yang dilaksanakan oleh Dekranasda melalui pelatihan tenun sudah berjalan dengan baik karena berpedoman pada Surat Keputusan Walikota Pontianak tentang Warisan Budaya Tak Benda dan Corak Insang serta sukses mengikutsertakan masyarakat pada setiap kecamatan di Kota Pontianak dalam pelatihan tenun. Selain itu pelatihan ini juga melibatkan Diskumdag dalam menaungi para pengrajin sekaligus pelaku usaha mikro kain tenun melalui hal legalitas izin usaha serta subsidi alat tenun.

Kata kunci: Peran, Pembangunan Masyarakat, Tenun, WBTB (Warisan Budaya Tak Benda).

PENDAHULUAN

Kondisi geografis negara Indonesia yang berbentuk kepulauan menjadikan kebudayaan yang ada di negara Indonesia menjadi bermacam-macam. Salah satu kebudayaan yang hampir ada di seluruh daerah di Indonesia adalah kain tradisional tenun. Daerah-daerah yang memproduksi kain tenun antara lain dimulai dari Jawa, Banten, Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara, Bali, Papua, dan Kalimantan. Setiap daerahnya, kain tenun mempunyai nilai, makna, sejarah, dan teknik yang cukup sulit dari segi motif, warna, benang, dan jenis benang yang digunakan (Purnama et al., 2020). Proses pembuatan kain tenun terutama di Kalimantan Barat tepatnya di Kabupaten Sambas masih menggunakan Alat Tradisional Bukan Mesin (ATMB). Hal ini berhubungan dengan pernyataan Viatra (2014) bahwa seni kerajinan songket adalah karya tenun yang tidak dapat lepas dari Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Dengan alat inilah para penenun di Kalimantan Barat menghasilkan kain tenun yang memiliki corak sangat khas. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk membuat satu kain tenun adalah menghani atau nganek, menggulung benang atau nattar, merapatkan benang atau ngabung, merantang, dan terakhir penenunan.

Di Kota Pontianak selaku ibukota dari Provinsi Kalimantan Barat terdapat sebuah Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa yang mayoritas dihuni oleh masyarakat Suku Madura yang mengungsi akibat kerusuhan antar suku di Kabupaten Sambas tahun 1998. Masyarakat tersebut datang pada tahun 1999 dan meneruskan usaha tenun yang sudah dilakukan ketika masih tinggal di Kabupaten Sambas. Hingga saat ini kawasan tersebut memiliki 17 rumah tenun yang memproduksi kain tenun menggunakan Alat Tradisional

Bukan Mesin (ATMB) khas Kalimantan Barat dengan mayoritas pekerjaannya adalah perempuan. Kegiatan menenun ini bukanlah menjadi pekerjaan utama mereka melainkan hanya pekerjaan sampingan. Untuk proses pemasaran sendiri penenun di Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa menyerahkan kepada pengumpul di Kabupaten Sambas lewat pertukaran bahan baku dan kain hasil jadi. Dari sinilah para penenun akan mendapatkan upah sesuai dengan kain tenun yang dihasilkan. Kemudian kain tenun yang telah dikumpulkan akan dipasarkan oleh pengumpul hingga pembelinya dapat mencakup berbagai negara seperti Malaysia dan Brunei Darussalam (Maharani et al., 2020).

Penggunaan alat yang masih bukan mesin juga menjadi sebuah tantangan karena keterbatasan jumlah produksi karena membuat satu kain saja memakan waktu yang cukup lama. Selain itu, hingga saat ini para pengrajin tenun melakukan kegiatan menenun di rumah masing-masing bukan di tempat yang memadai dan ideal seperti sebuah studio menenun. Namun, hal-hal tersebut tidak menutupi potensi dan keunikan dari kain tenun ini sendiri. Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Hj. Lismaryani Sutarmidji, berupaya untuk meningkatkan tingkat eksistensi pengrajin kain tenun. Dimulai dari menjadi reseller hasil-hasil kerajinan tenun yang dipajang di Kantor Dekranasda dengan menjual harga yang sama persis dengan harga dari pengrajin, hingga upaya-upaya lain seperti melakukan pelatihan dan bantuan kepada para pengrajin tenun. Kegiatan ini dilakukan dengan alasan agar kain tenun tetap eksis ditengah gempuran modernisasi dan dapat diterima tidak hanya oleh kalangan tua, tetapi juga oleh kalangan muda (Eriyanty et al., 2020).

Untuk mencapai kesuksesan dalam membangun masyarakat pada suatu wilayah khususnya di Kota Pontianak, perlu adanya suatu upaya yang berbentuk kebijakan maupun program oleh pemerintah dengan melibatkan secara langsung target dari masyarakat yang menjadi tujuan pembangunan tersebut. Salah satu usaha yang dilakukan untuk melatih dan membina masyarakat khususnya mereka yang berorientasi sebagai pelaku usaha mikro di bidang tenun adalah program pelatihan tenun yang diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Pontianak. Hal ini dimaksudkan karena minimnya masyarakat yang pandai dalam menenun dan juga pengrajinnya padahal produk tenun sangat diminati oleh masyarakat lokal maupun luar daerah. Namun karena terbatasnya jumlah penenun membuat sebagian pengrajin kewalahan apabila ada yang ingin memesan produk kain tenun dalam jumlah banyak. Seperti yang diketahui bahwa kain tenun merupakan kain khas kebudayaan yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Namun di era modern saat ini, minat akan tenun tersebut perlahan mulai memudar terutama dikalangan anak muda. Oleh karena itu agar kebudayaan tetap terjaga maka perlu adanya kesadaran masyarakat serta adanya peran pemerintah dengan mengajak masyarakat untuk bersama-sama melestarikan tenun.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekrnasda) Kota Pontianak dalam menyelenggarakan program pelatihan tenun bagi masyarakat khususnya bagi mereka yang memang sudah menjadi pengrajin serta pelaku usaha mikro dengan produk tenun atau yang belum sama sekali masuk ke dalam kegiatan menenun.

METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif berfokus pada informasi yang bersifat non-numerik (bukan angka) dengan menonjolkan landasan teori yang digunakan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan (Admin, 2023). Pendekatan deskriptif menurut Nazir (1999:63) merupakan

suatu studi untuk menetapkan fakta dengan interpretasi yang akurat untuk mengenal fenomena serta mencitrakan secara jelas sifat dari beberapa kejadian, kelompok dan individu yang sedang terjadi. Maksud dari pendekatan ini adalah untuk mencitrakan fakta, sifat serta hubungan fenomena yang menjadi objek penelitian secara akurat, faktual dan sistematis.

Untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi literatur (*literature study*). Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip, serta mengumpulkan data-data secara teoritis melalui pencarian pada buku-buku maupun artikel di jurnal sebagai data sekunder untuk dijadikan landasan dalam pemecahan masalah di penelitian ini (Bryllian & Kisworo, 2021). Data-data yang diperoleh digunakan untuk membantu proses penyelesaian analisis terkait peran dari Dekranasda dengan sudut pandang teori implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III melalui empat variabel yaitu komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions*), dan struktur birokrasi (*bureaucracy structure*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Dekranasda Melalui Pelatihan Tenun Dalam Rangka Pembangunan Masyarakat Kota Pontianak menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik (*Implementing Public Policy*) yang dikemukakan oleh George C. Edwards III pada tahun 1980 dengan empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh Dekranasda Kota Pontianak kepada masyarakat adalah dengan mengadakan sosialisasi untuk mengajak masyarakat ikut serta dan bergabung dalam pelatihan tenun demi meningkatkan perkembangan tenun di Kota Pontianak. Sosialisasi ini dilakukan sebagai upaya dalam pemecahan masalah tentang pelestarian tenun yang dimana terdapat ancaman globalisasi dan minat generasi muda yang cenderung kurang terhadap Warisan Budaya Tak Benda ini. Masalah pembangunan masyarakat dalam aspek kebudayaan khususnya bagi mereka para pengrajin tenun adalah jumlahnya yang masih sangat sedikit. Dengan adanya masalah ini maka timbullah keinginan Dekranasda Kota Pontianak sebagai organisasi dibawah naungan pemerintah yang mengurus berbagai hal tentang kebudayaan dan kerajinan daerah untuk mengadakan sosialisasi mengenai program pelatihan tenun sekaligus menyelenggarakan kegiatan tersebut. Sosialisasi sebagai langkah komunikasi yang dilakukan oleh Dekranasda dalam rangka mengajak dan memperkenalkan kerajinan tenun kepada masyarakat agar kerajinan tenun di Kota Pontianak terus berkembang. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya di sekitaran wilayah kota saja, namun juga di beberapa wilayah kecamatan dan kemudian sosialisasi tersebut dibantu dengan PKK yang ada di setiap kecamatan agar dapat merekrut masyarakat dalam kegiatan pelatihan tenun. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa didalam kehidupan, komunikasi adalah persyaratan yang utama dalam kehidupan manusia (Karyaningsih, 2018)

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang merupakan pelaku utama penyelenggara pelaksana program pelatihan tenun di Gedung UMKM Center adalah dari Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Kota Pontianak yang digagas oleh ketuanya yaitu Ibu Dr. Dra. Hj. Yanieta Arbiastuite, Apt., M.M., M.Sc beserta dengan jajaran. Dalam implementasi sebuah program khususnya pelatihan tenun, keberadaan sumber daya manusia yang memiliki visi besar sangat dibutuhkan untuk menyukseskan pelaksanaan pelatihan tenun di Kota Pontianak.

Seperti yang dikatakan oleh Nirman didalam (Madya, 2018), bahwa memang benar oranglah yang membuat barang-barang dan jasa yang bernilai tinggi suatu bangsa dan hasil-hasil yang bernilai itulah yang menentukan kesejahteraan dalam taraf hidup suatu masyarakat. Ini sama halnya dengan keberadaan pengrajin tenun di Kota Pontianak yang jumlahnya masih sedikit serta keahlian pada sebagian masyarakat yang terbilang kurang dalam menenun sehingga perlu adanya upaya peningkatan dan pembangunan masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai sosial budaya yang sudah turun temurun ini.

Warisan kebudayaan ini tentunya akan menjadi sebuah masalah jika sumber daya manusia yang memang berfokus pada hal tersebut semakin berkurang sehingga produksi kerajinan tenun akan menurun dan lama-kelamaan habis dan menghilang. Oleh sebab itu perlu adanya pengembangan sumber daya manusia agar kelestarian budaya tetap utuh. Untuk mewujudkan pengembangan sumber daya tersebut, Dekranasda melaksanakan sebuah program pelatihan tenun agar dapat meningkatkan kualitas serta membuka peluang dalam pembangunan sumber daya manusia khususnya masyarakat Kota Pontianak. Agar program ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar, Dekranasda melakukan sebuah kerja sama dengan Diskumdag (Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan) Kota Pontianak. Kerja sama yang dilakukan dalam menyukkseskan pelatihan ini adalah dengan memfasilitasi hak legalitas izin usaha para pengrajin oleh Diskumdag yang nantinya akan menjadi kelompok binaan dari Dekranasda.

Tabel 1. Daftar Nama Pengrajin Pada Sentra Kampung Tenun Khatulistiwa

No	Nama	Alamat
1	Kurniati	Jl. Khatulistiwa Gg. Sambas Jaya
2	Julia. S	Jl. Khatulistiwa Gg. Sambas Jaya
3	Nuriani Wulandari	Jl. Khatulistiwa Gg. Sambas Jaya
4	Salmah	Jl. Khatulistiwa Gg. Sambas Jaya
5	Hotipah	Jl. Khatulistiwa Gg. Sambas Jaya
6	Fitrina	Jl. Khatulistiwa Gg. Sambas Jaya
7	Misbah	Jl. Khatulistiwa Gg. Sambas Jaya
8	Nursiah	Jl. Khatulistiwa Gg. Sambas Jaya
9	Sulih	Jl. Khatulistiwa Gg. Sambas Jaya
10	Fatimah	Jl. Khatulistiwa Gg. Sambas Jaya
11	Mila	Jl. Khatulistiwa Gg. Sambas Jaya
12	Julia. N	Jl. Khatulistiwa Gg. Sambas Jaya
13	Sanirah	Jl. Khatulistiwa Gg. Sambas Jaya
14	Marsinah	Jl. Khatulistiwa Gg. Sambas Jaya
15	Torina	Jl. Khatulistiwa Gg. Sambas Jaya
16	Marintan	Jl. Khatulistiwa Gg. Sambas Jaya
17	Mamel	Jl. Khatulistiwa Gg. Sambas Jaya
18	Esa	Jl. Khatulistiwa Gg. Sambas Jaya
19	Rusnah	Jl. Khatulistiwa Gg. Sambas Jaya
20	Sariyeh	Jl. Khatulistiwa Gg. Sambas Jaya
21	Aisyah	Jl. Khatulistiwa Gg. Sambas Jaya
22	M. Iqbal	Jl. Khatulistiwa Gg. Sambas Jaya
23	Erna	Jl. Khatulistiwa Gg. Sambas Jaya
24	Luluk. M	Jl. Khatulistiwa Gg. Sambas Jaya
25	Sulih	Jl. Khatulistiwa Gg. Sambas Jaya

Sumber: Diskumdag Kota Pontianak

Pengurusan hak legalitas izin usaha ini penting bagi masyarakat untuk dapat menjalankan aktivitas mereka dalam ruang lingkup sebagai pelaku usaha mikro yang legal agar memiliki badan hukum yang jelas sehingga tujuan pembangunan masyarakat semakin terarah dan terlindungi. Dalam hal atau kegiatan apa pun jika sumber daya manusianya tidak berkualitas maka akan menciptakan hasil yang tidak optimal (Kasmawati, 2019). Salah satu sentra yang sudah mengurus legalitas tersebut adalah Kampung Tenun Khatulistiwa dengan penanggung jawabnya yaitu Ibu Kurniati. Sentra Kampung Tenun Khatulistiwa beralamatkan di Jalan Khatulistiwa Gg. Sambas Jaya, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dengan jumlah pengrajin yang sudah mencapai 25 orang. Dengan adanya pelatihan tenun yang diselenggarakan oleh Dekranasda secara umum bagi para pengrajin dan masyarakat serta izin legalitas usaha yang diberikan kepada para pengrajin secara khusus, Warisan Budaya Tak Benda kain tenun diharapkan dapat terus lestari dan terjaga keberadaannya di generasi yang akan datang.

3. Disposisi

Dengan adanya aturan terkait upaya pelestarian dan perlindungan tenun yang telah ditetapkan, Ketua Dekranasda Kota Pontianak yang dalam hal ini adalah Ibu Dr. Dra. Hj. Yanietta Arbiastuite, Apt., M.M., M.Sc, berkewenangan menjadi pihak utama sebagai wakil dari pemerintah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian tenun dan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual pada motif tenun Corak Insang melalui penerbitan Surat Keputusan Walikota Pontianak mengenai Warisan Budaya Tak Benda serta pelaporan yang telah dilakukan terhadap desain Corak Insang pada kain tenun sebagai kekayaan intelektual komunal dalam EBT (Ekspresi Budaya Tradisional) dalam (Firmansyah et al., 2023). Dasar inilah yang dipegang oleh pimpinan Dekranasda untuk terus konsisten mengadakan program pelatihan tenun sebagai salah satu upaya untuk melestarikan kebudayaan menenun kain di Kota Pontianak melalui aturan hukum yang sudah ada.

Ketua Dekranasda selaku pembuat program pelatihan tenun dalam rangka pembangunan masyarakat di Kota Pontianak memberi arahan kepada seluruh jajaran dan anggota yang memang notabene mengurus berbagai aspek potensi kerajinan di daerah khususnya Kota Pontianak. Dengan arahan dan persiapan yang baik oleh seluruh pihak yang terlibat, pelatihan tenun yang di selenggarakan dapat berjalan secara efektif sesuai dengan panitia pelaksana yang berkompeten di bidangnya. Dekranasda juga memfasilitasi tempat untuk melaksanakan pelatihan tenun yang berada di Gedung UMKM Center di Jalan Sultan Abdurrahman No. 14, Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Kemudian, dalam pelaksanaan pelatihan tenun, pihak Dekranasda juga mengundang salah satu fasilitator dari Jawa Barat yang bernama Pak Evi. Untuk turut mendukung program ini, Dekranasda dibantu oleh Diskumdag Kota Pontianak dengan menyediakan alat tenun sebanyak 6 buah kepada setiap kecamatan yang ada di Pontianak dengan penanggung jawabnya yaitu masing-masing Ketua PKK di kecamatan tersebut. Selain alat tenun, pihak Diskumdag juga memberi bantuan pengurusan legalitas izin usaha bagi masyarakat Kota Pontianak yang serius ingin menjadi pengrajin sekaligus pengusaha kain tenun.

4. Struktur Birokrasi

Interpretasi Standar Operasional Prosedur yang ada di Dekranasda dalam pelaksanaan program pelatihan tenun ini sudah sesuai dengan Surat Keputusan Walikota sekaligus sebagai badan hukum untuk melestarikan kebudayaan tenun di Kota Pontianak. Dekranasda telah ditetapkan sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan program pelatihan tersebut. Selain SOP, terdapat juga struktur kepengurusan Dewan Kerajinan Nasional Republik Indonesia saat ini sebagai ketua umumnya dijabat oleh istri dari Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Ibu Hj. Wury Estu Handayani Ma'ruf Amin, dan Ketua Dekranasda Kota

Pontianak adalah Ibu Dr. Dra Hj. Yanieta Arbiastutie, Apt., M.M., M.Sc. Ketua umum Dekranasda melakukan pembagian kerja melalui pembentukan panitia pelaksana agar kegiatan ini dapat berjalan secara baik dan diharapkan kedepannya program kerja pelatihan tenun ini akan bisa konsisten dilaksanakan setiap tahun dan juga program pelatihan tenun dalam rangka pembangunan masyarakat di Kota Pontianak ini menjadi lebih terstruktur dan jelas dalam pengimplementasian kebijakannya. Menurut pendapat Edward III dalam (Agustino, 2016) menyebutkan dengan adanya fragmentasi struktur birokrasi memiliki tujuan untuk membagi tanggung jawab berkaitan dengan program kerja pelatihan tenun, aktivitas, dan kegiatan lainnya sesuai dengan bidangnya masing-masing agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Pembangunan kesejahteraan masyarakat selalu menjadi isu yang diupayakan perwujudan oleh berbagai pihak. Perwujudan kesejahteraan masyarakat dapat dimulai dari pembangunan-pembangunan kecil seperti peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakatnya melalui pelatihan, pembinaan, hingga pemberdayaan. Begitu juga yang dilakukan oleh Dekranasda Kota Pontianak melalui program pelatihan kain tenun guna meningkatkan produksi masyarakat yang nantinya akan memberi dampak terhadap pembangunan masyarakat. Penelitian ini melihat peran Dekranasda sebagai mitra non pemerintah yang berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat, berdasarkan hasil analisis penelitian dengan Teori Implementasi Kebijakan Publik oleh George C. Edward III tahun 1980 dapat disimpulkan dengan empat variabel, antara lain:

1. Komunikasi

Komunikasi yang telah dilakukan antara Dekranasda Kota Pontianak adalah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengajak bergabung dalam pelatihan tenun. Sosialisasi yang dilakukan sebagai upaya dalam pemecahan masalah terkait pelestarian tenun dan peningkatan produksi kain tenun itu sendiri. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya di sekitaran wilayah kota saja, namun juga di beberapa wilayah kecamatan dan kemudian sosialisasi tersebut dibantu dengan PKK yang ada di setiap kecamatan agar dapat merekrut masyarakat dalam kegiatan pelatihan tenun.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam hal program pelatihan tenun oleh Dekranasda berfokus pada Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pelaku utama merupakan Dekranasda Kota Pontianak itu sendiri. Pengembangan sumber daya manusia agar kelestarian budaya tetap utuh harus diikuti dengan program yang tepat sasaran seperti pada yang dilakukan oleh Dekranasda dimana berfokus terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia pengrajin kain tenun sehingga para peserta kain tenun adalah orang-orang yang memang pengrajin kain tenun ataupun orang-orang yang berminat menjadi pengrajin tenun. Selain itu pemanfaatan sumber daya dinas pemerintahan juga dimanfaatkan dengan sebaik mungkin seperti melakukan kerja sama dengan Diskumdag (Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan) Kota Pontianak.

3. Disposisi

Ketua Dekranasda selaku pencetus dan penanggung jawab program pelatihan tenun dalam rangka pembangunan masyarakat di Kota Pontianak berhak memberi arahan kepada seluruh jajaran dan anggotanya yang memang memiliki

tanggung jawab untuk mengurus berbagai aspek sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dekranasda juga memfasilitasi tempat pelaksanaan pelatihan di Gedung UMKM Center Kota Pontianak dan mengundang fasilitator dari Jawa Barat sebagai pemateri pelatihan serta menyediakan alat tenun sebanyak 6 buah bersama Diskumdag Kota Pontianak yang kemudian dibagikan ke setiap kecamatan di Kota Pontianak.

4. Struktur Birokrasi

Pelaksanaan program pelatihan kain tenun tidak dilakukan tanpa adanya prosedur dan mekanisme yang jelas. Interpretasi Standar Operasional Prosedur yang ada di Dekranasda dalam pelaksanaan program pelatihan tenun sudah sesuai dengan Surat Keputusan Walikota sekaligus sebagai badan hukum untuk melestarikan kebudayaan tenun di Kota Pontianak. Selain SOP, terdapat juga struktur kepengurusan Dekranasda Kota Pontianak dengan ketua umumnya yaitu Ibu Dr. Dra. Hj. Yanieta Arbiastutir, Apt., M.M., M. Sc. Ketua umum Dekranasda melakukan pembagian kerja melalui pembentukan panitia pelaksana agar kegiatan dapat berjalan baik dan tertata rapi secara terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryllian, D., & Kisworo, K. (2021). Sistem Informasi Monitoring Kinerja Sdm (Studi Kasus: Pt Pln Unit Pelaksana Pembangkitan Tarahan). *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 1(2), 264–273. <https://doi.org/10.33365/jatika.v1i2.622>
- Eriyanty, E., Affrilyno, A., & Caesariadi, T. W. (2020). Sentra Galeri Kerajinan Tenun Kalimantan Barat Di Kota Pontianak. *JMARS: Jurnal Mosaik Arsitektur*, 8(2), 535. <https://doi.org/10.26418/jmars.v8i2.42451>
- Firmansyah, H., Ramadhan, I., Wiyono, H., Eka, A., & Sastra, T. (2023). Perkembangan dan pelestarian tenun Corak Insang khas kota Pontianak. *0341*, 12–20.
- Kartono, D. T., & Nurcholis, H. (2016). Konsep dan Teori Pembangunan. *Pembangunan Masyarakat Desa Dan Kota*, IPEM4542/M, 23–24.
- Kasmawati. (2019). Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Pendidikan Islam. *Journal.Uin-Alauddin*, VIII, 1–11.
- Madya, E. B. M. E. B. (2018). Pentingnya Pembinaan Sumber Daya Manusia. *Al-Idarah: Jurnal Pengkajian Dakwah Dan Manajemen*, 5(6), 1–12.
- Maharani, S. A., Mulki, G. Z., Yuniarti, E., Teknik, F., Tanjungpura, U., Teknik, F., & Tanjungpura, U. (2020). Strategi pengembangan kampung wisata tenun khatulistiwa kecamatan pontianak utara. *JeLAST: Jurnal PWK, Laut, Sipil. Tambang* 7 (2), 7(2).
- Noho, Y., & dkk. (2018). Pengemasan Warisan Budaya Tak Benda Paiya Lohungo Lopoli. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 4(2), 179–192.
- Purnama, R., Utami, C., & Prihatiningtyas, N. C. (2020). Ekplorasi Etnomatematika DEksplorasi Etnomatematika dalam Motif Tenun Kain Lunggi Sambas Kalimantan Barat dan Implikasinya terhadap Pembelajaran Matematikaalam Motif Tenun kain Lunggi Sambas kalimantan Barat Dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran. *Variabel*, 3(1), 36. <https://doi.org/10.26737/var.v3i1.1307>
- Tamsuri, A. (2022). Literatur Review Penggunaan Metode Kirkpatrick untuk Evaluasi Pelatihan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8), 2723–2734. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1154/879>
- Utomo, G. C., & Yunita, M. (2022). Kain Tenun Di Industri Mode Indonesia. *Folio*, Volume 3(Nomor 1), (hlm.4-5).

Widijatmoko, E. K., Ladamay, I., & Rera, M. S. I. (2019). Keaslian Budaya Tenun Ikat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(November), 57–66.

Buku

Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Karyaningsih, P. D. (2018). *Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Samudera Biru.

Website

Admin. (2023, April 3). Pengetahuan Umum. Retrieved from PMB ITATS: <https://pmb.itats.ac.id/mengenal-perbedaan-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif/#:~:text=Penelitian%20kualitatif%20digunakan%20dalam%20studi,sif>

Dinisari, M. C. (2022, Juny 30). Relationship. Retrieved from *Bisnis Style*: <https://lifestyle.bisnis.com/read/20220630/219/1550058/melestarikan-wastra-tenun-salah-satu-warisan-budaya-tak-benda>